

STRATEGI KEHUMASAN DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Meisyka Dwi Fartha¹, Taufik Akhyar², Putri Citra Hati³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
email: ¹2120701030@radenfatah.ac.id, ²taufikakhyar_uin@radenfatah.ac.id,
³putricitrahati_@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola informasi publik, dengan fokus pada penerapan model komunikasi simetris dan asimetris. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan staf Humas dan wartawan media lokal untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik komunikasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Provinsi Sumatera Selatan secara aktif membangun komunikasi timbal balik dengan media. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan masukan dari wartawan, yang menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan. Selain itu, Humas memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyajikan konten yang informatif dan menarik, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Penggunaan media sosial dan situs web resmi pemerintah menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan transparansi. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi pemerintah, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan komunikasi dua arah, di mana pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendengar yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang inklusif dan partisipatif, guna membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan media.

Kata kunci: Kehumasan Pemerintah, Informasi Publik, Komunikasi Publik

ABSTRACT

This study aims to analyze the South Sumatra Provincial Government's public relations strategy in managing public information, focusing on the application of symmetrical and asymmetrical communication models. Using a qualitative approach, the research involved in-depth interviews with PR staff and local media journalists to gain a comprehensive understanding of the communication practices undertaken. The results show that South Sumatra Province's PR actively builds reciprocal communication with the media. They not only deliver information, but also listen to feedback from journalists,

which creates a more harmonious and mutually beneficial relationship. In addition, PRs utilize various digital platforms to present informative and engaging content, thus reaching a wider audience. The use of social media and official government websites are important tools in disseminating information and increasing transparency. This strategy has proven effective in improving government information disclosure, which in turn contributes to increased public trust in the government. The findings emphasize the importance of strengthening two-way communication, where the government acts not only as a conveyor of information, but also as a responsive listener to people's needs and aspirations. As such, this study provides recommendations for local governments to continue developing inclusive and participatory communication strategies, in order to build better relationships with the public and the media.

Keywords: *Government Public Relations, Public Information, Public Communication*

PENDAHULUAN

Pengelolaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, fungsi ini dijalankan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Sumsel dengan pendekatan strategis yang mengedepankan komunikasi dua arah dan pemanfaatan teknologi digital (Arkarizki dkk, 2023). Pengelolaan informasi oleh Humas di lingkup pemerintahan tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti potensi penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks), keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan kurangnya pemanfaatan teknologi yang optimal. Tantangan ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta citra pemerintah di mata publik (Rochmaniah dkk, 2021). Pelayanan informasi yang baik, yang ditandai dengan transparansi, akurasi, fleksibilitas, dan kecepatan, merupakan harapan masyarakat. Semakin terbukanya informasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menilai kinerja badan publik (Nababan, 2020).

Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima secara efektif oleh Masyarakat, dan keluhan dari masyarakat dapat ditangani secara efektif oleh Humas. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan kepuasan dan kepercayaan publik (Dakir, 2018). Dalam era keterbukaan informasi, fungsi Humas dalam organisasi publik menjadi vital sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Humas berupaya memastikan bahwa setiap program dan kebijakan diketahui masyarakat luas (Badilla, 2019). Menurut Grunig dan Hunt (1984), terdapat dua model komunikasi dominan dalam hubungan organisasi dengan publik, yaitu hubungan simetris dan asimetris. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi strategi kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola informasi publik dan bagaimana penerapan kedua model komunikasi tersebut.

Strategi kehumasan yang diterapkan oleh Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya sistematis untuk membangun komunikasi yang efektif antara

pemerintah dan masyarakat. Strategi komunikasi berperan penting dalam membantu program kehumasan di lembaga pemerintahan agar lebih efektif, karena dapat meningkatkan reputasi dan membujuk masyarakat untuk bertindak (Yusuf & Ridwan, 2018). Dengan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai strategi kehumasan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengolah informasi publik guna meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pengolahan informasi publik ini merupakan proses bagaimana informasi dari Humas dapat dikelola dengan baik sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik ketika informasi tersebut disampaikan.

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan terhadap strategi kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai pengelolaan informasi publik. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah seberapa jauh strategi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memahami pengelolaan informasi publik agar dapat disebarluaskan dengan akurat kepada masyarakat. Di akhir penelitian ini, peneliti berharap bahwa informasi yang dikelola oleh Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan manfaat kepada publik dan meningkatkan pemahaman mengenai pemerintahan. Selain itu, diharapkan Humas dapat terus berinovasi dan beradaptasi untuk mensukseskan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih maju.

KAJIAN TEORI

Humas pemerintah memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi publik, yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Grunig dan Hunt (1984), humas berperan sebagai pengelola utama informasi yang bertujuan untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, peran ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan pemerintah disampaikan secara efektif dan transparan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa humas merupakan ujung tombak dalam membangun citra positif lembaga (Arkarizki dkk, 2023).

Strategi komunikasi persuasif merupakan pendekatan yang digunakan oleh humas pemerintah untuk mempengaruhi sikap dan perilaku Masyarakat (Yovinus, 2018). Menurut Yusuf dan Ridwan (2018), strategi ini melibatkan penyampaian informasi yang meyakinkan melalui berbagai media komunikasi, baik tradisional maupun digital. Sebagai contoh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menerapkan strategi ini dalam mempromosikan objek wisata Bukit Seguntang melalui kerja sama dengan agen perjalanan dan pemanfaatan media sosial. Penelitian oleh Badilla (2019) juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan jangkauan informasi dan interaksi dengan masyarakat.

Dalam era digital, Penggunaan media sosial merupakan salah satu pendekatan strategis yang krusial dalam mendukung penyampaian informasi, kehumasan pemerintah. Media sosial seperti Instagram dan Facebook digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan interaktif kepada masyarakat. Namun, keberhasilan strategi ini

bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai. Sebagai ilustrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan dalam mengelola akun Instagram secara efektif karena keterbatasan SDM dan infrastruktur (Rochmaniah dkk, 2021).

Membangun hubungan yang baik dengan media massa juga merupakan strategi penting dalam kehumasan pemerintah. Humas perlu menjalin komunikasi yang efektif dengan media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan berimbang. Dakir (2018) menekankan pentingnya hubungan yang baik antara pemerintah dan media massa untuk meningkatkan kepercayaan publik. Di Provinsi Sumatera Selatan, humas pemerintah berupaya meningkatkan hubungan ini melalui penyediaan materi informasi yang memadai dan pelaksanaan konferensi pers secara rutin.

Pengelolaan informasi publik oleh humas pemerintah tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan koordinasi antarinstansi (Putri & Habibie, 2022). Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang kehumasan dapat menghambat efektivitas penyampaian informasi kepada publik. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak konsisten atau tidak lengkap.

Dengan memahami teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi kehumasan yang efektif dalam pengelolaan informasi publik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memerlukan perencanaan yang matang, pemanfaatan media komunikasi yang tepat, serta hubungan yang baik dengan media massa. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi juga menjadi faktor penentu keberhasilan strategi kehumasan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya pada Kantor Biro Humas dan Protokol yang berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan kode pos 30121. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan realitas sosial secara sistematis dan faktual berdasarkan data non-numerik. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2014), pendekatan deskriptif kualitatif memfokuskan pada pengumpulan data berupa narasi, gambar, atau simbol lainnya, bukan dalam bentuk angka atau statistik.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu teknik Miles dan Huberman, dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode.

1. Reduksi Data yaitu menyederhanakan dan mengorganisir data yang sudah terkumpul. Tahap ini meliputi meringkas data, pengkodean, pembuatan catatan, dan penyimpanan data.

2. Penyajian Data yaitu untuk mengorganisasi data untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Data yang sudah direduksi disajikan secara visual atau deskriptif dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif.
3. Penarikan Kesimpulan yaitu dilakukan dengan Menafsirkan data yang telah dikumpulkan serta mengidentifikasi kesimpulan atau pola-pola yang muncul berdasarkan hasil temuan tersebut.

Setelah data yang diperoleh dilapangan terkumpul langkah selanjutnya penulis menganalisa setiap data dari informan untuk ditarik pembahasan mengenai Strategi Kehumasan dalam Pengelolaan Informasi Publik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang mana akhirnya ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Setelah itu, penulis menggunakan teknik sampling *purposive* untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik sampling *purposive* yaitu cara menentukan informan dengan memilih informan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penulis dalam penelitian ini. Adapun para informan yang terpilih adalah Kasubbag Pemberitaan dan Audiovisual, Kasubbag Informasi Publik dan Penangan Pengaduan dan Wartawan Tribun Sumsel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menjelaskan dan menguraikan hasil data yang diperoleh melalui teknik pengambilan data yang dilakukan dengan komunikasi dua arah, di mana peneliti berperan sebagai komunikator dan responden sebagai komunikan. Proses ini melibatkan interaksi aktif antara peneliti dan responden, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai strategi kehumasan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah mengumpulkan data melalui tahapan komunikasi dua arah dan dokumentasi, penulis berhasil mendapatkan hasil yang relevan dengan rumusan masalah mengenai strategi kehumasan dalam pengelolaan informasi publik.

Merujuk pada hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan, peneliti dapat menjabarkan mengenai, strategi kehumasan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan strategi komunikasi yang komprehensif untuk mengelola informasi publik secara efektif. Herrman, sebagai Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Audiovisual, menjelaskan bahwa Humas telah melakukan inovasi dalam strategi komunikasi publik dengan menggandeng berbagai platform media yang ada di Sumatera Selatan. Inovasi ini mencakup pemanfaatan media konvensional dan kanal informasi kekinian, seperti media sosial, untuk mempercepat distribusi informasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi kepada masyarakat luas. Herrman menekankan pentingnya kolaborasi dengan semua platform media di Sumatera Selatan untuk penyebaran informasi yang masif. Dengan langkah ini, Humas Pemprov Sumsel menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan pemahaman akan pentingnya digitalisasi Untuk menjalin interaksi yang lebih harmonis dengan masyarakat.

Selain itu, Kepala Sub Bagian Informasi Publik dan Penangan Pengaduan menambahkan bahwa strategi yang digunakan oleh Humas adalah membangun komunikasi secara timbal balik. Humas menyajikan konten dalam berbagai bentuk, seperti video, artikel, dan media sosial, serta menjalin hubungan baik dengan media massa. Pernyataan ini menegaskan bahwa Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi satu arah, tetapi juga aktif mendengarkan dan merespons kebutuhan informasi dari publik melalui berbagai saluran komunikasi. Humas menjalin komunikasi dua arah dengan media massa melalui kemitraan strategis, konferensi pers, dan forum diskusi rutin. Langkah-langkah ini bertujuan Guna menjamin bahwa pesan yang disampaikan pemerintah dapat tersampaikan secara akurat dan tepat waktu, serta untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan media.

Dalam wawancara terpisah, Linda, seorang wartawan dari Tribun Sumsel, memberikan pandangannya mengenai kualitas informasi yang disampaikan oleh Humas. Ia menyatakan bahwa informasi yang dibagikan oleh Humas biasanya sudah melalui proses konfirmasi dengan pihak terkait dan dipantau oleh tim Humas untuk memastikan kebenarannya sebelum disebarluaskan. Namun, ia juga mencatat bahwa ketepatan waktu informasi bersifat relatif, tergantung pada tingkat kesulitan data yang diminta. Jika data tersebut mudah diperoleh, maka informasi dapat disampaikan dengan cepat. Namun, jika data tersebut kompleks, akan memerlukan waktu lebih lama untuk disampaikan. Pernyataan dari Linda menunjukkan bahwa meskipun Humas berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, tantangan dalam hal ketepatan waktu tetap ada, tergantung pada kompleksitas informasi yang harus dikelola. Hal ini mencerminkan realitas yang dihadapi oleh banyak lembaga pemerintah dalam upaya mereka menyampaikan informasi yang akurat dan disampaikan secara tepat waktu kepada masyarakat.

Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara aktif Menggunakan beragam media digital, termasuk jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, sebagai sarana untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat luas. Konten yang disajikan oleh Humas mencakup artikel berita, video dokumenter, dan infografis yang dirancang khusus untuk menarik perhatian masyarakat serta memudahkan pemahaman terhadap kebijakan dan program pemerintah. Proses produksi konten ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari peliputan kegiatan, editing oleh tim pemberitaan dan audiovisual, hingga evaluasi kelayakan publikasi yang dilakukan oleh Kepala Bagian Humas. Herman, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Audiovisual, menekankan pentingnya peran media sosial dalam strategi komunikasi kehumasan. Ia menjelaskan bahwa Platform media sosial tidak semata-mata digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, akan tetapi juga berperan dalam membangun hubungan yang baik dengan publik. Selain itu, media sosial memungkinkan Humas untuk memantau isu atau krisis yang mungkin muncul, meningkatkan brand awareness, dan mengawasi respon publik terhadap informasi yang disampaikan. Dengan demikian, Humas memanfaatkan media sosial sebagai alat strategis dalam memperkuat komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.

Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga aktif melakukan klarifikasi terhadap berita yang tidak akurat atau simpang siur. Dalam situasi tertentu, Humas

mengadakan konferensi pers atau menerbitkan rilis resmi untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip hubungan simetris, di mana komunikasi dua arah digunakan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik. Namun, dalam menghadapi isu-isu sensitif atau negatif, Humas juga menerapkan pendekatan asimetris dengan mengarahkan opini publik melalui penyampaian informasi yang terstruktur dan terkontrol.

Dalam konteks ini, Humas berperan sebagai mediator yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh publik. Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang aktif dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, Humas dapat Meningkatkan jangkauan audiens dan memastikan relevansi informasi yang disampaikan tepat waktu.

Humas juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyampaian informasi, Humas dapat menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar terhadap program-program pemerintah. Hal ini sesuai dengan kaidah dasar dalam komunikasi partisipatif yang menekankan akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui forum diskusi dan kegiatan interaktif lainnya, Humas dapat mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan.

Dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital, Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital, Humas dapat memperluas jangkauan audiens dan memastikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Di samping itu, Humas juga berfokus pada pengembangan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen informasi publik, guna memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Humas juga berperan penting dalam membangun citra positif pemerintah di mata publik. Dengan menyajikan informasi yang akurat dan transparan, Humas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, Humas harus mampu mengelola isu-isu yang sensitif dan negatif dengan baik, sehingga dapat meminimalkan dampak buruk terhadap citra pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam mengelola isu-isu ini mencakup komunikasi yang terbuka dan jujur, serta upaya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan informasi publik, Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memperhatikan aspek etika komunikasi. Humas harus dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya tepat, tetapi juga sesuai dengan prinsip etika dan tidak menyesatkan. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas serta kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Dengan menerapkan prinsip etika komunikasi, Humas dapat memperkuat hubungan dengan publik dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan kombinasi antara model hubungan simetris dan

asimetris, sesuai dengan teori Grunig dan Hunt (1984). Pendekatan ini memungkinkan Humas untuk dapat menajalin hubungan harmonis dengan publik sekaligus menjaga citra positif pemerintah di tengah dinamika informasi yang berkembang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Edutik Universitas Negeri Manado, yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam pengelolaan informasi publik. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang inklusif dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik.

Dengan demikian, Humas tidak hanya bertindak sebagai saluran informasi., tetapi juga sebagai mediator yang aktif dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta bagaimana mereka dapat terus meningkatkan efektivitas komunikasi publik di era digital ini.

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan fokus yang lebih mendalam terkait dampak dari strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas terhadap persepsi publik dan tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini dapat mencakup analisis kuantitatif untuk mengukur efektivitas komunikasi Humas dalam meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana Humas dapat lebih baik dalam mengelola isu-isu sensitif dan krisis komunikasi, serta bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memperdalam pemahaman mengenai strategi kehumasan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan praktik kehumasan yang lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memainkan peran krusial dalam pengelolaan informasi publik dengan menerapkan komunikasi timbal balik yang efektif, memanfaatkan media digital secara optimal, dan menjalin hubungan erat dengan media massa. Melalui strategi komunikasi yang simetris dan asimetris, Humas dapat menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan konteks yang dihadapi, baik dalam menyebarkan informasi yang akurat maupun dalam mengelola isu-isu sensitif. Dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial, Humas tidak hanya mempercepat distribusi informasi, tetapi juga meningkatkan interaksi dengan masyarakat, sehingga menciptakan saluran komunikasi yang lebih responsif dan transparan.

Untuk meningkatkan fungsi kehumasan di masa depan, penting bagi Humas untuk mengoptimalkan forum diskusi rutin antara mereka dan media. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, mendiskusikan isu-isu terkini, dan memperkuat kolaborasi dalam penyampaian informasi kepada publik. Dengan memperkuat transparansi dan responsivitas terhadap dinamika isu publik, Humas dapat membangun

kepercayaan yang lebih besar di kalangan masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan tepat waktu. Pendekatan ini akan membantu Humas dalam menjaga citra positif pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 594-605.
- Badilla, M. R. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penghargaan Pemberian Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/17242>
- Dakir, D. (2018). Manajemen humas di lembaga pendidikan era global.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nababan, S. (2020). Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 17(2), 166-180.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151.
- Putri, S. A. D., & Habibie, D. K. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 457-466.
- Rochmaniah, A., Dharma, F. A., & Utomo, D. M. B. (2021). *Buku Ajar Dasar-dasar Public Relations*. *Umsida Press*, 1-63.
- Yovinus, Y. (2018). Peran komunikasi publik media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 185-211.
- Yusuf, B., & Ridwan, H. (2018). Manajemen komunikasi dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah (pada biro humas dan PDE sekretariat daerah Propinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 4(1), 50-64.